

## **Perlindungan Aspek Ekonomi Pekerja Kantor Notaris Di Kecamatan Tembilahan Kota Perspektif Undang-Undang**

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implikasi dan kendala perlindungan upah pekerja menurut perspektif Undang-Undang 2) Bagaimana pengaturan kedepan tentang hak dan kewajiban pekerja notaris dalam perspektif Undang-Undang?. Dengan tujuan dari penelitian tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan sumber Data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan melakukan wawancara, dengan menggunakan Teori Kepastian Hukum, Teori perlindungan Hukum dan Teori Penegakan Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Bahwa pelaksanaan perlindungan upah di Kecamatan Tembilahan kota belum berjalan sesuai dengan ketentuan UMK, sebab UMK merupakan standar yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kebutuhan hidup yang layak, diatur dalam Undang-Undang, yang berakibatkan Notaris dilarang membayar upah minimum yang telah ditentukan. Kendala dalam pelaksanaan perlindungan upah. Kendalanya yaitu: a. kurang pengawasan terhadap notaris. b. Kurangnya pegawai pekerja didinas ketenagakerjaan yang menyebabkan pengawasan tidak efektif. c. Tidak terbukanya pengusaha mengenai pelanggaran upah yang terjadi. d. Tidak adanya aduan dari pekerja mengenai upah yang diberikan dibawah standar. (2) Penerapan hak-hak terhadap karyawan di kantor Notaris kecamatan Tembilahan Kota berdasarkan aturan yang berlaku, ternyata banyak Notaris yang menyalahi dan menyimpangi aturannya, yang mana Notaris membayar Upah tidak sesuai UMK yang telah ditetapkan. Bentuk sanksi apabila Notaris tidak menerapkan upah standar yang bekerja di kantor Notaris di kecamatan Tembilahan Kota, dapat berbentuk pidana. 1) Sarankan sudah seharusnya ada pengaturan khusus didalam Undang-undang Jabatan Notaris terkait dengan upah, kemudian kepada Dinas ketenagakerjaan disarankan sudah sebaiknya untuk melakukan pengawasan atau peringatan terhadap Notaris yang ternyata memberikan gaji dibawah UMK. 2) Kepada Dinas Ketenagakerjaan sudah seharusnya melakukan pengawasan atau peringatan terhadap Notaris yang ternyata memberikan gaji dibawah UMK, sehingga Notaris tersebut dapat secepat mungkin melakukan perubahan terhadap penggajian pada karyawannya, untuk menjaga nama baik notaris tidak ada salahnya memberikan upah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

**Kata Kunci : Perlindung, Upah, Pekerja**

***Protection Of Economic Aspects Notary Staff In Tembilahan City  
District From Legal Perspective***

**ABSTRACT**

The objectives of this research are: 1) What are the implications and obstacles to protecting workers' wages from the perspective of the law? 2) What are the future regulations regarding the rights and obligations of notary workers from the perspective of the law? With the aim of this research, the research method used is empirical juridical research with primary data sources obtained directly from the research field by conducting interviews, using Legal Certainty Theory, Legal Protection Theory and Law Enforcement Theory. The results of the research show that: (1) That the implementation of wage protection in the Tembilahan City District has not been running in accordance with the UMK provisions, because the UMK is a standard set by the government based on decent living needs, regulated in law, which results in Notaries being prohibited from paying minimum wages which has been specified. Obstacles in implementing wage protection. The obstacles are: a. lack of supervision of notaries. b. Lack of workers in the employment service which causes supervision to be ineffective. c. Employers are not open about wage violations that occur. and violates the rules, in which the Notary pays wages that do not comply with the stipulated UMK. The form of sanction if a Notary does not apply the standard wages for working in a Notary's office in the Tembilahan City sub-district, can be in the form of a crime. 1) Suggest that there should be special regulations in the Law on Notary Positions related to wages, then it is recommended that the Manpower Service should carry out supervision or warning against Notaries who apparently pay salaries below the minimum wage. 2) The Manpower Service should carry out supervision or warning against Notaries who apparently pay salaries below the minimum wage, so that the Notary can make changes to the salaries of his employees as quickly as possible, to maintain the good name of the notary there is no harm in providing wages in accordance with the applicable laws and regulations.

**Keywords : Protection, sallary, Notary staff.**